

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

**Jln. Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR Satria) PURWOKERTO 53114
Telp. (0281) 641069 e-mail : dinpertanbunhut@banyumaskab.go.id**

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
TAHUN 2013-2018**



**DEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas, yang merupakan gabungan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. Tugas pokok Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah subbidang tanaman pangan dan hortikultura, subbidang perkebunan dan subbidang penunjang pada urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan serta bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa Negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan, terbatasnya akses

petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Tantangan pembangunan pertanian ke depan antara lain bagaimana memenuhi kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani kecil, memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

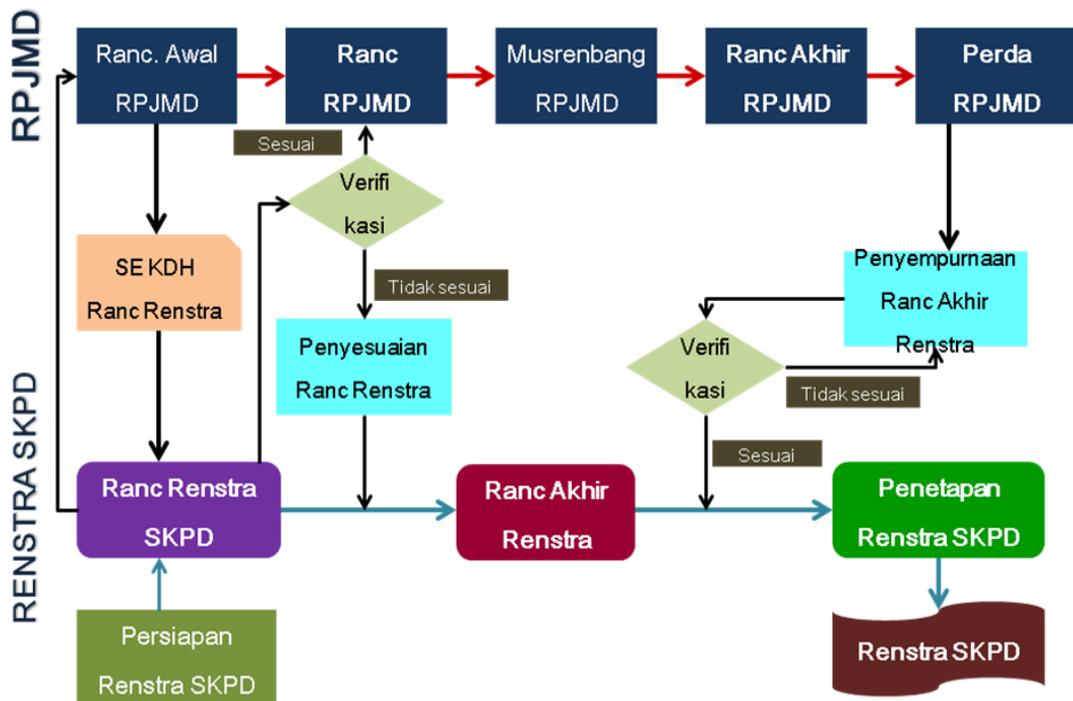
Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas dan pembangunan bidang kehutanan di daerah secara umum dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah pusat. Melalui penancangan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma pembangunan pertanian telah berubah. Jika pada dekade terdahulu pembangunan pertanian lebih difokuskan pada peningkatan produksi pangan saja, maka pada era otonomi ini fokus pembangunan pertanian ditujukan pada kemandirian masyarakat petani.

Penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Banyumas harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, rasional, optimal dan bertanggung jawab sesuai kemampuan dan daya dukung sumberdaya hutan dan lahan pertanian dan kebun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan, lahan dan keseimbangan lingkungan. Guna mewujudkan hal tersebut perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran,

kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas selama lima tahun ke depan yang mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2013 -2018, sekaligus mengemban amanah Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian dan selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan periode 2013-2018 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018. Rencana Strategis tersebut akan dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD, sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan tahunan.



1. 2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
3. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2005 tentang Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Penyusunan Renstra SKPD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas;

1. 3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra (Rencana Startegis) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas :

- a. Menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018
- b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013– 2018;

- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

2. Tujuan

- a. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
- b. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2013– 2018;

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud Dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
 - 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD
 - 2.2 Sumber Daya SKPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/ L Dan Renstra Propinsi
 - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
 - 4.1 Visi Dan Misi SKPD
 - 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
 - 4.3 Strategi Dan Kebijakan SKPD
- Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
- Bab VII Penutup
- Lampiran

BAB. II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Pembangunan pertanian sebagai salah satu sub sistem pembangunan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan pertanian mempunyai dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pokok manusia sekaligus sebagai salah satu penghasil devisa negara dari sektor non migas. Kelangkaan bahan pangan sebagai akibat ketersediaan pangan yang tidak mencukupi secara langsung selain mempengaruhi perekonomian nasional juga mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri. Sehingga dapat dikatakan hasil pembangunan pertanian merupakan produk yang strategis, politis dan ekonomis.

Mengingat hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membentuk Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D). Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional sebagian urusan pemerintahan daerah sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub bidang perkebunan dan sub bidang penunjang pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka menurut Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, mempunyai fungsi :

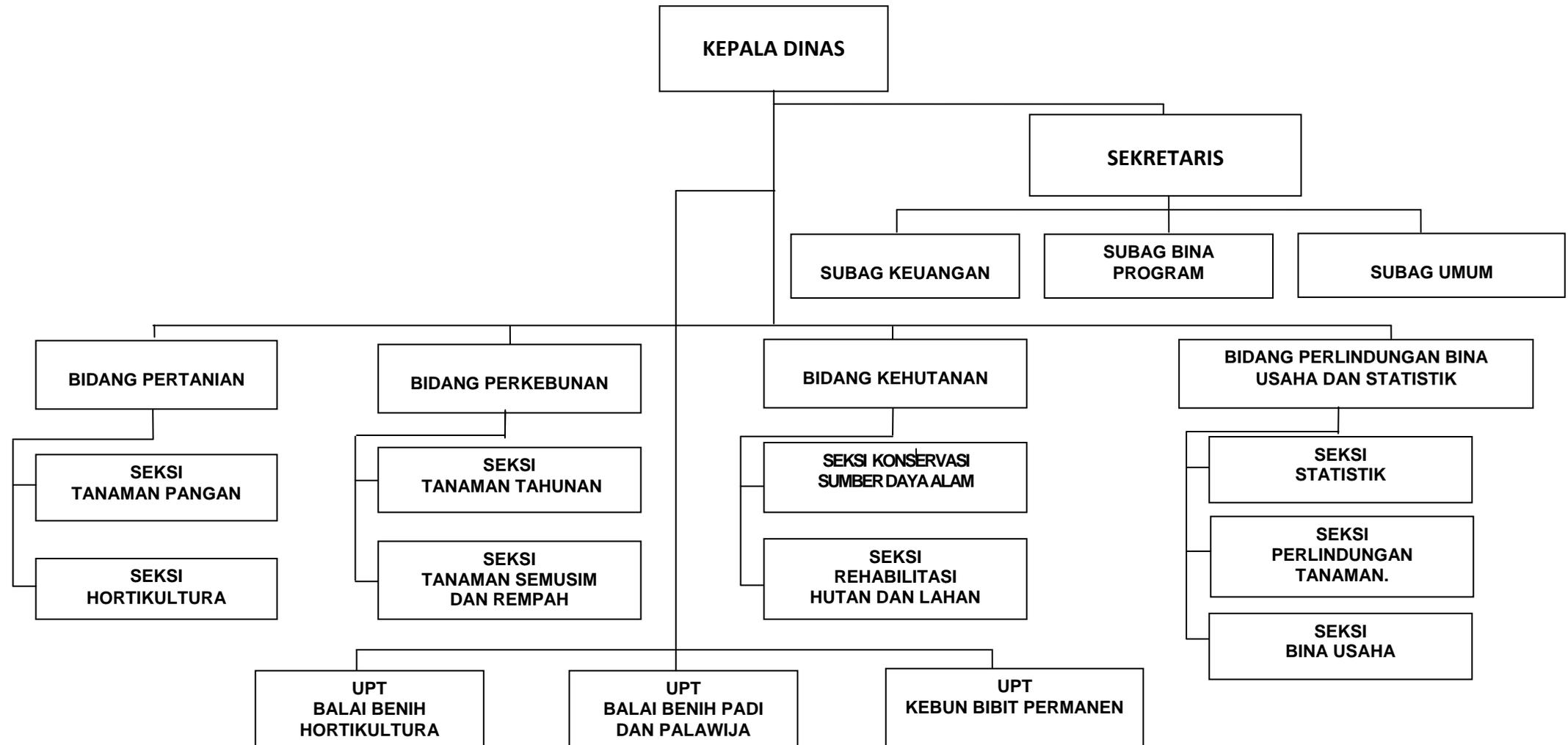
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pertanian, perkebunan dan kehutanan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pertanian, perkebunan dan kehutanan .

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pertanian, perkebunan dan kehutanan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tersebut, maka susunan organisasi dan bagan organisasi Dinpertanbunhut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris , terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Bina Program
3. Bidang Pertanian terdiri dari :
 - a) Seksi Tanaman Pangan
 - b) Seksi Hortikultura
4. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a) Seksi Tanaman Tahunan
 - b) Seksi Tanaman Semusim dan Rempah
5. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - a) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
 - b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
6. Bidang Statistik, Perlindungan dan Bina Usaha terdiri dari :
 - a) Seksi Perlindungan Tanaman
 - b) Seksi Statistik
 - c) Seksi Bina Usaha
7. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a) Balai Benih Padi dan Palawija
 - b) Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman
 - c) Kebun Bibit Permanen
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.



2. 2. Sumberdaya Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

1. Sumber Daya Alam Kabupaten Banyumas

a) Keaneekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Kabupaten Banyumas terletak diantara 109° dan $109^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan sekitar $7^{\circ} 30'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara Kabupaten Tegal dan Pemalang
- Sebelah Timur Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara
- Sebelah Selatan Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat Kabupaten Cilacap dan Brebes

Secara geografis Kabupaten Banyumas terletak pada lereng Gunung Slamet sebelah selatan dan timur serta menempati sebagian wilayah DAS Serayu bagian hilir.

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan 331 Desa dan Kelurahan. Wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 ha (3,85 % dari luas wilayah Jawa Tengah) dengan komposisi :

- 1) Luas lahan pertanian 32.226 ha, terdiri dari :
 - Luas sawah beririgasi teknis 10.608 ha
 - Lahan sawah beririgasi setengah teknis 4.832 ha
 - Lahan sawah irigasi sederhana 5.630 ha
 - Lahan sawah irigasi desa non PU 4.471 ha
 - Lahan tadah hujan 6.685 ha
- 2) Lahan pekarangan 19.107 ha
- 3) Tegalan / ladang 27.997 ha

b) Lahan dan Iklim

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Banyumas berkembang dari bahan induk tuf volkan intermediater, batu pasir, batu liat, batuan endapan, batu liat lunak, abu pasir, batuan volkan, serta endapan liat dan pasir. Sebaran jenis tanah secara administratif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.1. Sebaran jenis tanah secara administratif Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas Wilayah
1.	Banyumas	Asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat keabuan	3.809 ha
2.	Somagede	Alluvial kelabu kekuningan Alluvial kelabu tua Latosol coklat	4.011 ha
3.	Patikraja	Asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekuningan	4.323 ha
4.	Kebasen	Komplek podzolik merah kuning, podsolik kuning dan regosol	5.399 ha
5.	Sumpiuh	Komplek Alluvial kelabu kekuningan Komplek latosol merah kekuningan, podsolik merah kuning	6.001 ha
6.	Kemranjen	Komplek latosol merah kekuningan, podsolik merah kuning Alluvial hidromorf	6.071 ha
7.	Tambak	Komplek latosol merah kekuningan, podsolik merah kuning	5.203 ha
8.	Sokaraja	Alluvial hidromorf Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	2.992 ha
9.	Kalibagor	Komplek podzolik merah kuning, podsolik kuning dan regosol	3.573 ha
10.	Sumbang	Komplek podzolik merah kuning, podsolik kuning dan regosol Alluvial coklat keabuan	5.342 ha
11.	Pwt Utara	Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	901 ha
12.	Pwt Selatan	Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	1.375 ha
13.	Pwt Barat	Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	740 ha
14.	Pwt Timur	Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	842 ha
15.	Baturaden	Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	4.553 ha
16.	Kedungbanteng	Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	6.022 ha
17.	Karangle was	Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	3.248 ha
18.	Kembaran	Latosol coklat Assosiasi latosol coklat dan regosol kela	2.592 ha
19.	Ajibarang	Komplek latosol merah kekuningan, latosol coklat, podsolik merah kuning dan litosol Latosol coklat	6.653 ha

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas Wilayah
20.	Cilongok	Komplek latosol merah kekuningan, latosol coklat, podsolik merah kuning dan litosol Latosol coklat	10.534 ha
21.	Pekuncen	Komplek latosol merah kekuningan, latosol coklat, podsolik merah kuning dan litosol Latosol coklat	9.270 ha
22.	Jatilawang	Alluvial kelabu tua Alluvial kelabu kekuningan	4.816 ha
23.	Gumelar	Komplek latosol merah kekuningan, latosol coklat, podsolik merah kuning dan litosol	9.345 ha
24.	Wangon	Komplek podzolik merah kuning, podsolik kuning dan regosol Komplek latosol merah kekuningan, latosol coklat, podsolik merah kuning dan litosol Komplek podzolik merah kuning, dan kuning & regosol	6.078 ha
25.	Lumbir	Komplek latosol merah kekuningan, latosol coklat, podsolik merah kuning dan litosol Komplek podzolik merah kuning, podsolik kuning dan regosol	10.266 ha
26.	Purwojati	Komplek podzolik merah kuning, podsolik kuning dan regosol	3.786 ha
27.	Rawalo	Komplek podzolik merah kuning, podsolik kuning dan regosol Alluvial kelabu tua	4.964 ha
Jumlah			132.759 ha

Sedangkan sebaran tekstur tanah di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sebaran Tektur Tanah Kabupaten Banyumas

No	Kelas	Tekstur	Luas (ha)	Luas (%)
1.	Ringan	Sandy loam	296	0,28
2.	Sedang	Loam, clay loam, silty loam	12.543	11,87
3.	Berat	Caly, silty clay	92.826	87,85

Berdasarkan tingkat kemiringan maka wilayah Kabupaten Banyumas dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu :

Tabel 2.3. Tingkat Kemiringan Tanah Wilayah di Kabupaten Banyumas

Kategori	Harkat	Luas	
		(ha)	(%)
Datar	< 1	1.505	1,4
Agak datar	1 - < 3	43.696	41,3
Berombak	3 - < 8	19.500	18,4
Bergelombang	8 - < 15	7.457	7,2
Berbukit	15 – 45	33.507	31,7

Berdasarkan tingkat ketinggian tempat, wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai ketinggian beragam yaitu:

Tabel 2.4. Ketinggian Wilayah Kabupaten Banyumas

No	Tinggi tempat (m dpl)	Luas (ha)	%
1.	25	16.670,8	12,56
2.	25 – 100	38.289,7	28,84
3.	100 – 500	60.975,2	45,93
4.	500 – 1000	8.135,8	6,13
5.	Lebih dari 1000	8.688,1	6,54

Klasifikasi iklim menurut Oldeman menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas mempunyai tipe iklim bervariasi antara C2 – B2 dengan jumlah daerah bertipe iklim B2 yang lebih banyak. Sedangkan pengelompokan menurut CRR-FAO menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas mempunyai 1 – 3 bulan kering (< 75 mm) dan 6-9 bulan basah (> 200 mm). Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 2456 – 3895 mm. Kisaran suhu antara 24 – 26°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 52 – 100 % dengan kecepatan angin berkisar antara 2,1 – 7,4 km/jam.

Retensi hara di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabe 2. 5. Retensi Hara Lahan Kabupaten Banyumas

Kategori	Harkat	Luas	
		Hektar	%
PH H ₂ O (1:2,5)			
• Sangat masam	-	0	0
• Masam	4,5 – 5,5	13.927	13,2
• Agak masam	5,6 – 6,5	91.739	86,8
• Netral	-	0	0
• Agak basa	-	0	0
• Basa	-	0	0
KTK (me %)			
• Sangat rendah	> 5	0	0
• Rendah	5 - 16	0	0
• Sedang	17 - 24	19.839	18,77
• Tinggi	25 - 40	71.563	67,69
• Sangat tinggi	> 40	14.296	13,54

Berdasarkan kandungan hara makro yaitu nitrogen, fosphat dan kalium maka Kabupaten Banyumas merupakan daerah dengan kandungan hara nitrogen yang cukup baik serta kandungan kalium yang sangat baik. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.6. Ketersediaan Hara Lahan Kabupaten Banyumas

Kategori	Satuan	Retensi Hara			
		BO (%)	N (%)	P ₂ O ₅ (%)	K(%)
Sangat rendah	Hektar	2.133	4.766	104.762	-
	Persen	2,02	4,51	99,15	-
Rendah	Hektar	26.159	70.931	898	1.246
	Persen	24,76	67,13	0,85	1,18
Sedang	Hektar	62.437	27.346	-	8.753
	Persen	59,09	25,88	-	8,30
Tinggi	Hektar	14.934	2.262	-	27.542
	Persen	14,12	2,48	-	26,06
Sangat tinggi	Hektar	-	-	-	68.124
	Persen	-	-	-	64,46

Daya hantar listrik pada lahan-lahan di Kabupaten Banyumas menunjukkan nilai DHL kurang dari 1 mmhos. Sedangkan kandungan aluminium berada pada fase sangat rendah (kurang dari 10 %) sehingga tidak memberikan indikasi meracuni tanaman. Berdasarkan data-data tersebut di atas maka Kabupaten Banyumas secara umum mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan khususnya) karena faktor agroklimatologi yang sangat

mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman hortikultura.

Kabupaten Banyumas memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis, berupa dataran rendah dan tinggi serta limpahan sinar matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keanekaragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman asli daerah tropis maupun komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

Aneka ragam plasma nutfah tanaman yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis, merupakan sumber materi genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan varietas dan klon tanaman unggul. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

2. Sumber Daya Pertanian

a) Lahan Pertanian

Kabupaten Banyumas memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan potensi tersebut merupakan lahan sub optimal seperti lahan kering, yang produktivitasnya relatif rendah, karena kendala kekurangan dan kelebihan air, jenis tanah yang kurang subur serta keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah dan tinggi. Namun apabila keberadaan lahan sub optimal tersebut dapat direkayasa dengan penerapan inovasi teknologi budidaya dan dukungan infrastruktur jalan dan irigasi, maka lahan tersebut dapat dirubah menjadi lahan-lahan produktif. Di samping itu dapat pula dilakukan perluasan areal tanam melalui peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan subur beririgasi dengan varietas unggul baru umur super ultra genjah. Potensi tersebut merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman apabila dapat dirancang dengan baik pemanfaatannya.

Luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian, baik di lahan subur maupun lahan-lahan sub optimal.

b) Tenaga Kerja Pertanian

Tingginya jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras, sesungguhnya merupakan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian. Namun besarnya jumlah penduduk tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pengembangan pertanian yang berdaya saing.

Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuannya dan keterampilannya untuk dapat berkerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka jumlah penduduk yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar regional dan nasional. Masih terdapat cukup potensi meningkatkan kapasitas aneka produksi komoditas pertanian melalui penempatan tenaga kerja terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dengan didukung oleh stimulus dalam bentuk penyediaan faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

c) Teknologi Pertanian

Sesungguhnya saat ini sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi aneka produk pertanian. Berbagai varietas berdaya produksi tinggi, berbagai teknologi produksi pupuk dan produk bio, alat dan mesin pertanian, serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah cukup banyak dihasilkan dan diterapkan oleh

masyarakat petani. Beberapa keberhasilan alih teknologi di sektor pertanian melalui program PRIMA TANI, dan SLPTT telah mampu menggiatkan kegiatan agribisnis spesifik lokasi. Namun demikian aneka paket teknologi ini masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh masyarakat petani, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi dan dimiliki petani seperti proses diseminasi, kelembagaan dan skala usaha, keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi.

d) Pasar dan Pertumbuhan Jumlah serta Daya Beli Penduduk

Jumlah penduduk Banyumas yang besar merupakan potensi pasar lokal yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Banyumas tercatat sebesar 1.553.902 jiwa. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah.

Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Banyumas sehingga mempengaruhi daya beli.

Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat.

Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka diharapkan juga terjadi peningkatan permintaan produk pertanian di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap penganekaragaman produk pertanian.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian dari Kabupaten Banyumas juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar regional maupun nasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar regional maupun nasional dapat dimanfaatkan dengan berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Banyumas.

3. Sumber Daya Kehutanan

a) Luas Hutan

Luas hutan di Kabupaten Banyumas terdiri dari hutan negara 28.648,07 hektar dan hutan rakyat atau hutan milik seluas 12.353 ha. Luas hutan negara berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH Banyumas Timur 18.059 hektar; KPH Banyumas Barat 7.700,79 hektar dan KPH Kedu Selatan 2.887,91 hektar. Untuk selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.7. Luas Hutan Kabupaten Banyumas

No	Klasifikasi Hutan	Luas Hutan (Ha)			Jumlah
		HP	HPT	HL	
1.	Hutan Negara :				28.648,07
	a. KPH Bms Barat	6.411,69	1.289,10	-	7.700,79
	b. KPH Bms Timur	2.756,86	5.101,77	10.200,75	18.059,37
	c. KPH Kedu Sltn	27,21	2.860,70	-	2.887,91
2	Hutan Rakyat	-	-	-	12.353

Keterangan :

HP : Hutan Produksi;
HPT : Hutan Produksi Terbatas;
HL : Hutan Lindung

b) Luas Lahan Kritis

Berasarkan hasil penelitian Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas pada tahun 2013, diperoleh data jumlah lahan kritis di Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

- a) Lahan dengan katagori sangat kritis : 3.609,29 ha
- b) Lahan dengan katagori kritis : 12.395,29 ha
- c) Lahan dengan katagori agak kritis : 31.647,58 ha.

Upaya rehabilitasi lahan kritis diarahkan pada lahan-lahan dengan kriteria **kritis** dan **sangat kritis** seluas **16.004,58 ha**. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilaksanakan pada tahun 2008 s/d 2012 seluas 6.541 ha; sehingga jumlah sisa lahan kritis s/d akhir tahun 2007 seluas **9.424,58 ha**.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kegiatan rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan seluas **461 ha**, melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat (APBN) 400 ha dan kegiatan penghijauan APBD II seluas **61 ha**.

Dengan demikian sisa lahan kritis s/d akhir tahun 20012 seluas **9.002,10 ha**. Rehabilitasi lahan kritis tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kendala utama dalam merehabilitasi lahan kritis adalah keterbatasan anggaran dan sering terjadinya konflik antara kepentingan konservasi dan ekonomi dalam suatu lahan yang terbatas. Secara ekologi suatu lahan kritis harus dikonservasi dari kegiatan pengolahan tanah/lahan yang intensif, paling tidak menunggu 5-10 tahun untuk pemulihannya, tetapi karena tuntutan dan desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memaksa untuk mengolah lahan kritis secara intensif.

Rehabilitasi hutan dan lahan akan berhasil sepanjang tidak ada perubahan fungsi hutan/lahan menjadi peruntukan lain yang mengakibatkan rusaknya hutan/lahan, pengolahan lahan memenuhi kaidah-kaidah konservasi, serta meningkatkan usaha produktif masyarakat di pedesaan.

4. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas adalah 67 orang dengan perincian :

- a) Golongan IV, 9 orang
- b) Golongan III, 42 orang
- c) Golongan II, 14 orang
- d) Golongan I, 2 orang
- e) Tenaga Kontrak, 10 orang

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 maka seluruh PNS yang ada di daerah statusnya diserahkan ke daerah, sehingga seluruh PNS di Dinertanbunhut berstatus PNS DO (Daerah Otonom).

Menurut strata pendidikan, pegawai pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, dirinci sebagai berikut :

- a) Pasca Sarjana 9 orang
- b) Sarjana 25 orang
- c) Sarjana Muda 6 orang
- d) SLTA 24 orang

- e) SLTP 3 orang
- f) SD, 0 orang

5. Sarana Prasarana Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas

a) Barang bergerak

Berupa 6 kendaraan roda empat dan 55 unit kendaraan roda dua yang sampai dengan akhir tahun 2012 masih terawat dengan baik.

b) Barang Tidak bergerak

1) Tanah

Tanah yang dikelola oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 30 bidang tanah, dengan luas keseluruhan 1.765.628 m². Sampai dengan akhir tahun 2012, tanah tersebut sudah bersertifikat 26 bidang dan belum bersertifikat 4 bidang yang pada saat sekarang sedang diupayakan pembuatan sertifikat oleh Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Banyumas.

2) Gedung / bangunan

Gedung/bangunan yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas adalah 27 unit gedung, dan seluruhnya dalam kondisi baik.

3) Barang inventaris lainnya

Terdapat beberapa jenis inventaris lain yang dikelola Dinertanbunhut Kabupaten Banyumas antara lain computer, printer, mebelair, hand sprayer, brender dan barang-barang inventaris lainnya,

2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Capaian kinerja sektor pertanian memperlihatkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan. Selama 2008-2012, laju PDRB sektor pertanian memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya. Target PDRB sektor pertanian Rp. 2.317.000,- sampai dengan Rp. 3.290.000,- , tercapai pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.478.000,-.

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2012

No	TAHUN	TARGET (Rp)	PDRB (Rp)
1.	2008	2.317.000 – 3.290.00	1.834.000
2.	2009	2.317.000 – 3.290.00	2.030.000
3.	2010	2.317.000 – 3.290.00	2.259.000
4.	2011	2.317.000 – 3.290.00	2.478.000
5.	2012	2.317.000 – 3.290.00	

Selama tahun 2008-2012, rata-rata Nilai Tukar Petani mencatat angka melebihi 100 yang menunjukkan bahwa yang dibelanjakan petani lebih kecil dari yang didapatkan. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani.

Tabel 2.9. Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Banyumas tahun 2008-2012

No	TAHUN	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1.	2008	103,54	102,79
2.	2009	103,54	103,04
3.	2010	103,54	104,51
4.	2011	103,54	107,42
5.	2012	103,54	

Capaian produktivitas komoditas pertanian selama tahun 2008-2012 menunjukkan prestasi yang cukup baik, antara lain peningkatan produktivitas padi sawah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berturut-turut adalah 5,50 ton/ha, 5,65 ton/ha, 5,65 ton/ha, 5,50 ton/ha dan 5,25 ton/ha, walaupun target produktivitas padi sawah sebesar 5,70 ton/ha baru tercapai pada tahun 2012.

Target produktivitas jagung sampai tahun 2013 sebesar 5,65 ton/ha telah tercapai pada tahun 2011 sebesar 7,35 ton/ha dan tahun 2012 sebesar 6,58 ton/ha.

Peningkatan produktivitas komoditas kedelai selama periode 2008-2012 menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu dari target 1,50 ton/ha telah tercapai pada akhir tahun 2012 sebesar 1,67 ton/ha

Produksi komoditas pertanian selama tahun 2008-2012, khususnya komoditas pangan utama dan komoditas unggulan yang didorong pertumbuhannya secara nasional dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.10. Produktivitas padi dan bahan pangan Kabupaten Banyumas tahun 2008-2012

No	Komoditas	Target	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Padi Sawah	5,70	5,50	5,65	5,65	5,50	5,94
2.	Padi Gogo	4,00	3,49	4,33	4,34	3,41	4,20
3.	Jagung	5,65	4,90	4,85	4,60	7,35	5,77
4.	Kedelai	1,50	1,35	1,52	1,30	1,77	1,25

Upaya rehabilitasi lahan kritis diarahkan pada lahan-lahan dengan kriteria **kritis** dan **sangat kritis** seluas **16.004,58 ha**. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilaksanakan pada tahun 2008 s/d 2012 seluas 6.541 ha; sehingga jumlah sisa lahan kritis s/d akhir tahun 2012 seluas **9.424,58 ha**.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kegiatan rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan seluas **461 ha**, melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat (APBN) 400 ha dan kegiatan penghijauan APBD II seluas **61 ha**. Dengan demikian sisa lahan kritis s/d akhir tahun 20012 seluas **9.002,10 ha**. Rehabilitasi lahan kritis tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Tabel. 2.11. Pencapaian kinerja pelayanan Dimpertanbunhut Kabupaten Banyumas selama periode 2008 – 2012

No	Indikator Kinerja	Berdasar	Berdasar	Berdasar	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Realisasi				
		SPM	IKK	Lainnya	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
A. Bidang Kehutanan																			
1.	Peningkatan areal hutan rakyat (Ha)		15.579		15.579	15.579	15.579	15.579	15.579	9.579	9.607	13.482	16.957	19.492	61,49	61,67	86,54	108,85	125,12
2.	Rehabilitasi lahan kritis (berkurangnya lahan kritis) (Ha)		15.525		15.525	15.525	15.525	15.525	15.525	17.775	17.697	13.597	12.410	10.797	114,49	113,99	87,58	79,94	69,55
B. Bidang Pertanian																			
1.	Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani			103,54	103,54	103,54	103,54	103,54	103,54	102,79	103,04	104,51	104,50	104,55	99,28	99,52	100,94	100,93	100,98
2.	Peningkatan PDRB sektor pertanian (juta)			2.317.000 s/d 3.290.000	2.511. 600	2.706. 200	2.900. 800	3.095. 400	3.290. 000	1.834. 000	2.030. .000	2.259. .000	2.478. 000	2.578. 000	73,02	75,01	77,88	80,05	78,36
3.	Peningkatan luas panen padi atau bahan pangan lainnya (Ha)			74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	70.741	73.870	77.113	72.741	75.307	95,21	99,42	103,79	97,90	101,36
4.	Peningkatan produktifitas padi atau bahan pangan lainnya																		
	a. Padi sawah (Ton/Ha)		5,75		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,50	5,65	5,65	5,50	5,25	95,65	98,26	98,26	95,65	91,30
	b. Padi gogo (Ton/Ha)		3,90		3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,49	4,33	4,34	3,41	4,00	89,49	111,03	111,28	87,44	102,56
	c. Jagung ((Ton/Ha)		6,82		6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	4,90								107,77	
	d. Kedelai (Ton/Ha))		1,97		1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,35	1,52	1,30	1,77	1,67	68,53	77,16	65,99	89,85	84,77

Tabel. 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinpertambunhut Kabupaten Banyumas selama periode 2008 – 2012

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Anggaran dengan Realisasi					Rata-rata pertumbuhan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
A	Belanja																	
1.	Belanja Tidak Langsung	3.640.961.326	3.236.159.492	5.457.919.715	3.776.416.475	4.118.214.800	2.806.808.751	3.038.503.210	4.797.169.339	3.618.792.117	3.822.401.029							
a	Belanja Pegawai	3.640.961.326	3.236.159.492	5.457.919.715	3.776.416.475	4.118.214.800	2.806.808.751	3.038.503.210	4.797.169.339	3.618.792.117	3.822.401.029	77,09	93,89	87,89	95,83	92,82	113,11	86,73
b	Belanja Hibah																	
c	Belanja Bantuan Sosial																	
d	Belanja Bantuan Keuangan																	
e	Belanja Tidak Terduga																	
2.	Belanja Langsung	1.831.025.300	1.611.188.500	8.806.916.193	10.488.419.433	11.050.794.000	1.550.806.294	1.239.896.442	8.458.205.708	10.646.043.791	10.105.810.504							
a	Belanja Pegawai	294.323.500	294.323.500	466.453.500	244.537.500	262.128.000	251.580.000	251.580.000	444.426.000	244.537.500	246.963.500	85,48	85,48	95,28	100,00	94,21	89,06	85,48
b	Belanja Barang Jasa	1.349.601.800	1.123.926.035	2.085.282.693	9.511.798.805	9.044.491.000	1.117.110.294	853.408.942	2.289.170.435	9.722.849.516	8.389.968.504	82,77	75,93	109,78	102,22	92,76	670,16	99,39
c	Belanja Modal	187.100.000	192.938.965	6.255.180.000	732.083.128	1.744.175.000	182.116.000	134.907.500	5.724.609.273	678.656.775	1.468.878.500	97,34	69,92	91,52	92,70	84,22	932,22	94,39

Selain dalam bentuk indikator makro dan produksi, kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari capaian dalam bentuk dukungan peningkatan produksi, antara lain dukungan APBD Kabupaten Banyumas untuk sektor pertanian dan kehutanan selama periode tahun 2008-2013, memperlihatkan peningkatan.

Sementara itu, dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Bidang Kehutanan serta APBN (Tugas Pembantuan) pun memiliki sumbangsih yang sangat bermakna bagi percepatan pembangunan sektor pertanian dan kehutanan di Kabupaten Banyumas.

Guna mendukung peningkatan produksi pertanian, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang mencakup Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) serta Jalan Usaha Tani (JUT).

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pun melaksanakan pembangunan kelembagaan dan penguatan modal petani guna penciptaan pertanian yang mandiri melalui bantuan penguatan modal dan pengembangan kelembagaan melalui membangun aksesibilitas permodalan ke Kementerian Pertanian Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP), satu unit Gapoktan dapat menerima bantuan penguatan modal sebesar Rp 100 juta. Tahun 2012 sejumlah 20 Gapoktan menerima BLM-PUAP dan tahun 2013 diberikan bantuan kepada 12 Gapoktan.

Pada sektor kehutanan guna meningkatkan jumlah tegakan pada areal hutan rakyat atau tanah kosong, telah dibagikan bibit tanaman keras kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Jumlah bibit yang didistribusikan kepada masyarakat pada tahun 2012 sebanyak 1.163.850 batang. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Jumlah Bantuan Bibit Tahun 2008 - 2012

No	Sumber Dana/Bantuan	Jumlah Bibit (Batang) tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	APBN/Dephut	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000
2	APBN/Dephut	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	APBD Prov.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	APBD Kab. Banyumas	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
5	Perhutani	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6.	Perusahaan Kayu	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	JUMLAH	1.163.850	1.163.850	1.163.850	1.163.850	1.163.850

2. 4. Tantangan dan Peluang Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Harapan kedepan proses pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Banyumas adalah agar dapat menghadapi tantangan antara lain :

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi, yang mengakibatkan ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit
2. Kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun yang dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas pertanian
3. Ketidaksesuaian komoditas dan agroklimat serta waktu tanam sehingga beberapa pengembangan komoditas mengalami kegagalan.
4. Iklim yang sulit diperkirakan secara tepat sehingga pola dan tata tanam belum berjalan dengan baik.
5. Mekanisasi pertanian belum optimal sehingga menurunkan efisiensi usaha tani.
6. Belum mantapnya pelayanaan komoditas dan sentra komoditas.
7. Sumber daya petani yang relatif masih harus ditingkatkan khususnya dalam manajemen usaha tani dan transfer teknologi.
8. Eksplosi serangan OPT yang, menyebabkan beberapa lahan mengalami gagal panen.
9. Penelitian tentang teknologi budidaya belum spesifik lokasi dan komoditas.
10. Petani belum dapat memprediksi kebutuhan pasar terhadap komoditas tertentu.

11. Harga komoditas yang belum memihak pada peningkatan kesejahteraan petani.
12. Penanganan panen dan pasca panen yang sebagian besar masih bersifat relatif tradisional.
13. Belum berkembangnya sistem informasi pertanian berbasis data pertanian perkebunan dan kehutanan
14. Luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi

Namun demikian faktor-faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan produk pertanian, perkebunan dan kehutanan baik dalam negeri maupun luar negeri sangat tinggi dan merupakan potensi pasar (agro industri) yang luas.
2. Terbukanya kesempatan pengembangan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan karena kebutuhan yang meningkat terhadap kuantitas dan kualitas komoditas pertanian perkebunan dan kehutanan.
3. Keanekaragaman komoditas pertanian cukup tinggi baik tanaman pangan, hortikultura maupun sumber hayati lain.
4. Tersedianya teknologi budidaya yang mudah diterapkan baik spesifik lokasi maupun teknologi baru.
5. Jumlah tenaga kerja pertanian yang cukup banyak.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang cukup banyak.

BAB. III.**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI****3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan**

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.

Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai satu derajat celsius, sehingga akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun.

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi dan produktivitas pertanian.

2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan

sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, rawa dan air hujan.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, kebun dan kandang untuk penangkaran benih dan bibit, dan pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah kecukupan ketersediaan benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana

mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

3. Kecilnya Luas Penguasaan Lahan serta Tekanan Alih Fungsi Lahan

Pesatnya laju pembangunan di berbagai bidang yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatnya oleh tidak

mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani

Organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan kedepan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

6. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)

Pada umumnya petani di Kabupaten Banyumas tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil, akses petani terhadap

sumber permodalan menjadi terbatas, kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak.

Meskipun secara statistik perhitungan NTP di Kabupaten Banyumas di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

3. 2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2013–2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2013–2018 adalah :

“ TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ”

Pemerintahan yang **bersih**, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan yang **adil** berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar

individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat yang **sejahtera** menurut Joseph Murphy pada bukunya "*Think Yourself Rich*" dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat

yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta *virtuous cycle* dampak pembelajaran.

Masyarakat yang **berbudaya**. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan

dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang

dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari

pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki *multiplier* efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai

tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat.

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan

penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, *urban primacy* yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia,

ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkai ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan

berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran.

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas mengemban salah satu misi Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu misi 3 **Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.**

Table 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 :			
1.1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi dan produktivitas pertanian/ perkebunan yang masih rendah	Degradasi sumberdaya lahan	Tehnik budidaya pertanian ramah lingkungan
1.2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Daya serap dan keterbatasan kemampuan petani	tersedia paket teknologi tepat guna
1.3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan	Keterbatasan kepemilikan lahan dan modal usaha	Regulasi pemanfaatan ruang dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk
1.4	Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Kurangnya aksesibilitas petani terhadap pasar	Masih rendahnya Kuantitas, kualitas dan kontinyuis produk pertanian	Luasnya peluang pasar
1.5	Program Pengembangan Agribisnis	Usaha agribisnis belum berkembang dengan baik	sistem dan usaha perbenihan belum tangguh	Regulasi dan kebijakan pemerintah
1.7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan prasarana dan sarana usaha pertanian/ perkebunan belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki petani	Tingginya animo petani mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.8	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luasnya hutan dan lahan kritis	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perbaikan hutan dan lahan	Meningkatnya kebutuhan hasil hutan
1.9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Menurunnya Sumber Daya Hutan	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan Sumber Daya Hutan	Upaya Pengembangan Sumber Daya Hutan
1.10	Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Meningkatnya Industri Hasil Hutan	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi	Regulasi dan kebijakan pemerintah

3. 3. Telaahan RENSTRA Kementerian Pertanian

Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan telah berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang besar melalui keterkaitan input-output-outcomes antar industri, konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia dalah di sektor pertanian.

1. VISI Kementerian Pertanian

Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

2. MISI Kementerian Pertanian

- 1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
- 2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
- 3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
- 4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
- 5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
- 6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
- 7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
- 8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
- 9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
- 10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

3. Tujuan Kementerian Pertanian

- 1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.
- 2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
- 3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.

- 4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
- 5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

4. Target Utama Kementerian Pertanian

Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.
- 3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

5. Arah Kebijakan KementrianPertanian

- 1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).
- 2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), embaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan.
- 3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan.
- 4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri.
- 5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi omoditas impor.
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani.
- 7) Jaminan penguasaan lahan produktif.
- 8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.

- 9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.
- 10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan.
- 11) Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah.
- 12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.
- 13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.
- 14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM.
- 15) Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi.
- 16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.
- 17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional.
- 18) Penguatan sistem perkarantinaaan pertanian.
- 19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.
- 20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota.
- 21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

- 22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
- 23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.

6. Strategi Kementerian Pertanian

Strategi pembangunan pertanian selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia adalah **TUJUH GEMA REVITALISASI** yaitu :

- 1) Revitalisasi Lahan,
- 2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan,
- 3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana,
- 4) Revitalisasi SDM,
- 5) Revitalisasi Pembiayaan Petani,
- 6) Revitalisasi Kelembagaan Petani, dan
- 7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

3. 4. Telaahan RENSTRA Kementerian Kehutanan

Dari perspektif pelaksanaan prioritas pembangunan bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1. Prioritas pembangunan

Prioritas Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian diarahkan pada 2 (dua) prioritas bidang, yaitu:

- 1) Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan 2 (dua) fokus prioritas, terdiri dari :
 - a) Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri.

- b) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - c) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 2) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, dengan 4 (empat) fokus prioritas, meliputi :
- a) Pemantapan kawasan hutan.
 - b) Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
 - c) Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - d) Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan.

2. Visi Kementerian Kehutanan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di atas ditetapkan visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, yaitu **“Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”**.

3. Misi Kementerian Kehutanan

Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi Kementerian Kehutanan, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan pada:

- 1) Pemantapan kawasan hutan.
- 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
- 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
- 4) Konservasi keanekaragaman hayati.
- 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan.
- 6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
- 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan.
- 8) Penguatan kelembagaan kehutanan.

4. Prioritas Pembangunan Kementerian Kehutanan

Berdasarkan prioritas pembangunan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014, yaitu:

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 1 paket.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Ijin usaha pemanfaatan hutan alam dan restorasi ekosistem pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7. Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafficking sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Pengelolaan konservasi ekosistem, tumbuhan dan satwa liar sebagai potensi plasma nutfah pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya.
9. Rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
15. Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul.

16. Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini “wajar tanpa pengecualian” mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket

5. Program Pembangunan Kementerian Kehutanan

Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada Renstra Tahun 2010-2014, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi.
3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.
4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
5. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan.
6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Kehutanan.
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4. 1. Visi, dan Misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Visi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Banyumas. Visi Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 adalah ***Terwujudnya Pemerintah Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.*** Visi tersebut dijabarkan menjadi visi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, yaitu : ***Terwujudnya Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang produktif, efisien, berdaya saing dan lestari berwawasan lingkungan, serta berpotensi investasi, didukung pemerintahan yang bersih dan adil menuju kesejahteraan petani.***

Untuk mewujudkan Visi tersebut disusun Misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

1. Mengembangkan pertanian perkebunan dan kehutanan yang maju, berkeadilan, merata, berkelanjutan, berkerakyatan, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berpotensi investasi melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Mengembangkan teknologi dan informasi serta penyediaan sarana prasarana produksi guna mewujudkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan hutan, pemanfaatan sumberdaya pertanian, kebun dan hutan secara lestari.
4. Memberdayakan kelompok tani dan meningkatkan pendapatan dan peran serta masyarakat sekitar lahan dan hutan
5. Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi produksi pertanian perkebunan dan kehutanan.

4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Tujuan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan adalah :

1. Meningkatkan produksi dan efisiensi usaha, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis.
2. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi sederhana dan ramah lingkungan dalam peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan dan hutan yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pendapatan petani, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan.
4. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga sumberdaya hutan dapat berfungsi dalam pengendalian bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan bahaya kekeringan.
5. Meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan serta pemberdayaan petani.

Sasaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan kehutanan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis.
2. Terlaksananya kajian dan uji terap teknologi sederhana dan ramah lingkungan dalam peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan dan hutan yang berdaya saing.
3. Meningkatnya pendapatan petani, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan.
4. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi luasan lahan dan hutan kritis, sehingga sumberdaya hutan dapat berfungsi dalam pengendalian bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan bahaya kekeringan.
5. Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan serta pemberdayaan petani.

Untuk dapat memahami keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, maka dapat dilihat pada tabel 4.1. dibawah ini

Tabel 4.1. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran
1.	Meningkatkan produksi dan efisiensi usaha, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan kehutanan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis.	Peningkatan produktivitas komoditas pertanian
			Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan
			Peningkatan produksi komoditas pertanian
			Peningkatan produksi komoditas perkebunan
2.	Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi sederhana dan ramah lingkungan dalam peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan dan hutan yang berdaya saing.	Terlaksananya kajian dan uji terap teknologi sederhana dan ramah lingkungan dalam peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan dan hutan yang berdaya saing.	Terlaksananya aplikasi teknologi pertanian perkebunan dan kehutanan
			Pengembangan pertanian ramah lingkungan
			Penggunaan produk teknologi dan mekanisasi
3.	Meningkatkan pendapatan petani, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan.	Meningkatnya pendapatan petani, nilai tambah dan kesejahteraan petani	Peningkatan pendapatan petani
			Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
4.	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga sumberdaya hutan dapat berfungsi dalam pengendalian bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan bahaya kekeringan.	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi luasan lahan dan hutan kritis, pengendalian bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan bahaya kekeringan.	Pelaksanaan rehabilitasi lahan dan hutan
			Menurunnya lahan dan hutan kritis
			Tersedianya bangunan pegendali erosi
			Pelaksanaan gerakan penanaman pohon
			Konservasi sumberdaya hutan dan lahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
5.	Meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan serta pemberdayaan petani	Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan serta pemberdayaan petani.	Pembinaan kelompok tani dan kelompok masyarakat Cakupan kelompok tani dan kelompok masyarakat

4. 3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Strategi yang akan dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Peningkatan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan.
2. Pengamanan produksi dan pengurangan kehilangan hasil panen.
3. Pengembangan komoditas unggulan daerah dan pengembangan sentra komoditas.
4. Peningkatan ketrampilan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan kehutanan berbasis agribisnis.
5. Memfasilitasi akses modal, pemasaran dan investasi komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan
6. Peningkatan kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha.
7. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan mutu produk hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
8. Pengembangan informasi berbasis data dan teknologi melalui pengembangan system informasi pertanian.
9. Pengembangan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan,
10. Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat sekitar hutan, kebun dan lahan.
11. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi lahan kritis dan meningkatkan produktivitas lahan.
12. Pembinaan kelembagaan pertanian dan kehutanan.

Kebijakan yang akan dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, dan sarana produksi;
2. Meningkatkan dukungan ilmu pengetahuan, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
3. Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman;
4. Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air;
5. Memperluas areal lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan baru serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar;
6. Mengharmonisasikan peraturan perundangan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian;
7. Mengembangkan infrastruktur pertanian, perkebunan, kehutanan, seperti jalan produksi/usahatani, jaringan irigasi, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti alat transportasi;
8. Mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran dan pengamanan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan;
9. Meningkatkan kajian terhadap peluang pengembangan potensi lokal dan pengembangan plasma nutfah, serta pengembangan sentra-sentra komoditas produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terpadu.
10. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani melalui peningkatan manajerial dan pemupukan modal usaha.
11. Meningkatkan dukungan lembaga perbankan dan lembaga perkreditan yang berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
12. Memperpendek rantai pemasaran melalui membangun kedekatan aksesibilitas petani dan pengusaha dan membangun kemitraan usaha antara petani sebagai plasma dan pengusaha sebagai inti;
13. Meningkatkan mutu produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta efisiensi produksi, dan mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta jasa pendukungnya;
14. Mendorong investasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan industri yang berbasis produk lokal.
15. Mengembangkan mekanisasi pertanian perkebunan, kehutanan

16. Membangun dan mengembangkan kemitraan antara petani dan pengusaha/lembaga perkreditan dan perbankan
17. Meningkatkan dukungan kemampuan ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi sumber daya manusia pertanian, perkebunan, dan kehutanan dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana informasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan di pedesaan;
18. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan manfaat hutan dan lahan serta resiko hutan dan lahan kritis melalui penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan melalui membangun kemitraan dan kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dengan pemangku hutan;
19. Mengembangkan bidang usaha pendukung sektor kehutanan dan meningkatkan ketersediaan input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, dan sarana produksi;
20. Memperluas areal lahan hutan melalui pengembangan hutan rakyat serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering dan lahan marginal;
21. Gerakan rehabilitasi lahan kritis melalui peningkatan dan penganekaragaman tanaman kehutanan;
22. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap industri dan peredaran hasil hutan;
23. Melaksanakan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam hutan dan lahan;

Untuk dapat memahami keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan tahun 2013-2018, maka dapat dilihat pada tabel 4.2. dibawah ini :

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan produksi dan efisiensi usaha, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan kehutanan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis.	Peningkatan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, dan sarana produksi; Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman; Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air; Memperluas areal lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan baru serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar Mengharmonisasikan peraturan perundangan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian; Mengembangkan infrastruktur pertanian, perkebunan, kehutanan, seperti jalan produksi/usahatani, jaringan irigasi, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti alat transportasi
			Pengamanan produksi dan pengurangan kehilangan hasil panen.	Mengembangkan teknologi pasca panen pertanian perkebunan, kehutanan Mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran dan pengamanan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan
			Pengembangan komoditas unggulan daerah dan pengembangan sentra komoditas.	Meningkatkan kajian terhadap peluang pengembangan potensi lokal dan pengembangan plasma nutfah, serta pengembangan sentra-sentra komoditas produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terpadu.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2.	Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi sederhana dan ramah lingkungan dalam peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan dan hutan yang berdaya saing.	Terlaksananya kajian dan uji terap teknologi sederhana dan ramah lingkungan dalam peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan dan hutan yang berdaya saing.	Pengembangan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan	Memperpendek rantai pemasaran melalui membangun kedekatan aksesibilitas petani dan pengusaha dan membangun kemitraan usaha antara petani sebagai plasma dan pengusaha sebagai inti
			Pengembangan informasi berbasis data dan teknologi melalui pengembangan system informasi pertanian dan pangan.	Mengembangkan mekanisasi pertanian perkebunan, kehutanan Meningkatkan dukungan kemampuan ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi sumber daya manusia pertanian, perkebunan, dan kehutanan dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana informasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan di pedesaan
3.	Meningkatkan pendapatan petani, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan.	Meningkatnya pendapatan petani, nilai tambah dan kesejahteraan petani	Memfasilitasi akses modal, pemasaran dan investasi komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan	Mendorong investasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan industri yang berbasis produk lokal
			Peningkatan kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha	Membangun dan mengembangkan kemitraan antara petani dan pengusaha/lembaga perkreditan dan perbankan Meningkatkan dukungan lembaga perbankan dan lembaga perkreditan yang berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
			Peningkatan nilai tambah, daya saing dan mutu produk hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.	Meningkatkan mutu produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta efisiensi produksi, dan mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta jasa pendukungnya

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4.	Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga sumberdaya hutan dapat berfungsi dalam pengendalian bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan bahaya kekeringan.	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi luasan lahan dan hutan kritis, pengendalian bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan bahaya kekeringan.	Peningkatan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat sekitar hutan, kebun dan lahan	Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan manfaat hutan dan lahan serta resiko hutan dan lahan kritis melalui penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan melalui membangun kemitraan dan kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dengan pemangku hutan
			Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi lahan kritis dan meningkatkan produktivitas lahan	Mengembangkan bidang usaha pendukung sektor kehutanan dan meningkatkan ketersediaan input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, dan sarana produksi
				Memperluas areal lahan hutan melalui pengembangan hutan rakyat serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering dan lahan marginal
				Gerakan rehabilitasi lahan kritis melalui peningkatan dan penganeekaragaman tanaman kehutanan
				Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap industri dan peredaran hasil hutan
				Melaksanakan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam hutan dan lahan
5.	Meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan serta pemberdayaan petani	Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan serta pemberdayaan petani.	Peningkatan ketrampilan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan kehutanan	Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani melalui peningkatan manajerial dan pemupukan modal usaha.
			Pembinaan kelembagaan pertanian dan kehutanan.	Meningkatkan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
				Meningkatkan dukungan lembaga perbankan dan lembaga perkreditan yang berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

Faktor-faktor keberhasilan program pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Faktor Internal

(a). Kekuatan

- Adanya dukungan peraturan perundangan.
- Tersedianya lahan yang memadai.
- Beragamnya komoditas pertanian , perkebunan dan kehutanan yang dapat dikembangkan.
- Jaringan pendukung irigasi yang memadai.
- Kelembagaan Dinas yang mantap.
- Terdapat UPTD Balai Benih Padi dan Palawija ,UPTD Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman serta UPTD Kebun Bibit Permanen.
- Banyaknya penangkar benih dan bibit.
- Penyumbang PDRB terbesar.
- Komoditas potensial, strategis dan politis yang berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian.
- Daerah agraris dengan sebagian besar mata pencaharian penduduk pada sector pertanian.
- Potensi sumber daya alam yang mendukung.
- Terdapat sarana kredit lunak.
- Terdapat Fakultas Pertanian di beberapa Universitas yang mendukung pengembangan teknologi.
- Adanya standar pelayanan minimal.
- Jumlah dan tingkat pendidikan karyawan Dinpertanbunhut yang cukup memadai.
- Terdapat pelatihan teknis dan fungsional bagi karyawan.
- Sarana dan prasarana operasional yang cukup.

(b). Kelemahan

- Belum tersedianya system informasi pertanian, perkebunan dan kehutanan.

- Pengelolaan asset balai benih yang belum optimal.
- Pengawasan melekat yang masih rendah.
- Distribusi petugas teknis dan staf tidak merata dan tidak proporsional.
- Kurangnya tenaga administrasi.
- Rendahnya kualitas produksi hasil pertanian dan perkebunan.
- Belum ada rekayasa dalam proses produksi, sehingga masih sangat tergantung pada musim.
- Harga komoditas pertanian tidak stabil.
- Koordinasi lintas sector dalam penyediaan saprodi lemah.
- Belum berkembangnya industri agro dikalangan petani.
- Komoditas pertanian mudah rusak (perishable).
- Terbatasnya alsintan.
- Ego sektoral cukup besar.
- Kurangnya sarana agroindustri.
- Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal.
- Daya saing produksi rendah.
- Produksi yang dihasilkan masih banyak mengandung bahan kimia berbahaya.

2. Faktor Eksternal

(a). Peluang

- Sumberdaya alam yang potensial bagi perkembangan pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- Kebutuhan akan produk pertanian, perkebunan dan kehutanan baik dalam negeri maupun luar negeri sangat tinggi dan merupakan potensi pasar (agro industri) yang luas.
- Terbuka untuk mengembangkan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan karena kebutuhan yang meningkat terhadap kuantitas dan kualitas komoditas pertanian perkebunan dan kehutanan.

- Tersedianya teknologi budidaya yang mudah diterapkan baik spesifik lokasi maupun teknologi baru.
- Keanekaragaman komoditas pertanian cukup tinggi baik tanaman pangan, hortikultura maupun sumber hayati lain.
- Jumlah petani yang cukup banyak.
- Sarana prasarana transportasi yang sudah membaik
- Tingginya minat petani terhadap perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan kehutanan yang baru
- Dukungan kerjasama instansi lain.
- Jumlah dan kelembagaan petani yang cukup tinggi.
- Berkembangnya kemitraan antara produsen sarana produksi dengan petani.

(b). Ancaman

- Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang masih perlu ditingkatkan
- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi.
- Banyaknya barang-barang pertanian import sebagai akibat pasar bebas.
- Kepemilikan lahan yang sempit
- Musim yang tidak menentu sehingga saat tanam yang sangat tepat sulit diterapkan.
- Ledakan OPT secara sporadis pada daerah tertentu.
- Menurunnya kesuburan lahan.
- Terjadinya bencana alam
- Lahan marginal belum dimanfaatkan secara optimalisasi
- Harga sarana produksi yang tinggi
- Tenaga kerja pada sector pertanian didominasi oleh tenaga kerja non produktif (usia lanjut)
- Lemahnya posisi tawar petani
- Masih belum tertanganinya lahan kritis
- Masih banyaknya illegal logging

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan mendasarkan pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembanguna yang telah diuraikan sebelumnya, maka Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas menyusun rencana program dan kegiatan untuk tahun 2013-2018. Program prioritas pembangunan tersebut berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pogram prioritas yang diurai dalam kelompok urusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomnor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Urusan Pertanian

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program ini ditujukan untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Banyumas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui pelatihan petani dan pelaku agribisnis, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani, peningkatan sistem intensif dan disinsentif bagi petani / kelompok tani, penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur serta kegiatan lain yang mengarah pada peninkatan kesejahteraan petani.

b. Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian/perkebunan dan aksesibilitas petani terhadap pasar dan investasi. Program ini dilakukan melalui promosi dan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga serta pengembangan pemasaran

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

Program ini bertujuan untuk menerapkan teknologi baru, spesifik lokasi dan aplikasi introduksi teknologi luar yang dilakukan melalui pelatihan, penelitian, penyuluhan dan pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui penyediaan sarana, pengembangan bibit unggul, sertifikasi benih, pencegahan alih fungsi lahan, peningkatan produksi pertanian organik, pengembangan infrastruktur dan pengendalian organisme pengganggu tanaman,

2. Urusan Kehutanan

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Program ini diarahkan untuk penanganan lahan kritis, penanggulangan bahaya banjir, mempertahankan sumber mata air melalui pengembangan hutan rakyat dan penanaman bibit tanaman serta peningkatan kualitas produksi hasil hutan

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Program ini diarahkan untuk penyelamatan hutan lindung dan meningkatkan fungsi hutan lindung, penyelamatan satwa yang dilindungi dengan pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dan Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional.

c. Program Pembinaan dan Pernerbitan Industri Hasil Hutan

Program ini diarahkan untuk pengendalian peredaran dan penatausahaan hasil hutan pada industri hasil hutan melalui sosialisasi aturan kehutanan dan operasi peredaran kayu, *cheking cruising* pada hutan negara dan rekomendasi tebang pada hak hutan.

Program prioritas pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan diurai menjadi kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :

1. Urusan Pertanian
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 - 1) Pendukung kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan pertanian
 - 2) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
 - 3) Peningkatan kemampuan kelembagaan petani
 - b. Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
 - 1) Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
 - c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
 - 1) Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi
 - 2) Pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan
 - 3) Pengembangan Mekanisasi Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
 - d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
 - 1) Peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan
 - 2) Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
 - 3) Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - 4) Pengembangan perkebunan tanaman semusim dan rempah
 - 5) Pengembangan pertanian hortikultura
 - 6) Pengembangan infrastruktur bidang pertanian
 - 7) Pengembangan Pertanian Organik
 - 8) Pelatihan dan Penanaman Pohon Pepaya
 - 9) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - 10) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
2. Urusan Kehutanan
 - a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - 1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - 1) Pemeliharaan satwa yang dilindungi
 - 2) Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional
 - c. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan
 - 1) Pengendalian peredaran dan penatausahaan hasil hutan.

BAB VI**INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD, maka indikator kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas untuk periode tahun 2013-2018 dirumuskan sebagai Tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun		Target Tahun					Target Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.	Pertanian								
2.1.	Pengembangan Tanaman Pangan								
2.1.1.	Produktivitas Padi Sawah (Ton/Ha)	5,94	5,99	6,04	6,09	6,14	6,19	6,24	6,24
2.1.2.	Produktivitas Padi Gogo (Ton/Ha)	4,20	4,25	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	4,5
2.1.3.	Produktivitas jagung (ton/ha)	5,77	6,00	6,2	6,4	6,7	7,1	7,5	7,5
2.1.4.	Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,25	1,28	1,31	1,34	1,37	1,4	1,43	1,43
2.2.	Pengembangan Tanaman Hortikultura								
2.2.1.	Produksi Durian (kuintal)	12.887	13.107	31.659	32.005	32.870	33.235	34.600	34.600
2.2.2.	Produksi Pisang (kuintal)	148.381	164.463	187.500	188.250	189.000	189.750	190.500	190.500
2.2.3.	Produksi Cabe besar (kuintal)	1.051	3.121	5.665	7.629	9.715	11.921	13.140	13.140
2.2.4.	Pengembangan komoditas tanaman hortikultura (jenis)	6	6	6	6	6	6	6	6
2.3.	Pengembangan Tanaman Perkebunan								
2.3.1.	Produksi Cengkeh (ton)	202,95	232,95	262,95	292,95	322,95	352,95	382,95	382,95
2.3.2.	Luas Pengembangan tanaman cengkeh (Ha)	2.220,30	2.368,66	2.668,66	2.968,66	3.268,66	3.568,66	3.868,66	3.868,66
2.3.3.	Produksi Nilam (ton)	873,47	948,62	998,62	1.048,62	1.098,62	1.148,62	1.198,62	1.198,62
2.3.3.	Produksi Pala (ton)	9,76	9,77	9,79	9,81	9,83	9,85	9,87	9,87
2.3.4.	Produksi Kelapa Dalam (ton)	12.892,41	13.192,41	13.492,41	13.792,41	14.092,41	14.392,41	14.962,41	14.962,41

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun		Target Tahun					Target Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.3.5.	Produksi Kelapa Deres (ton)	52.114,56	52.164,56	53.114,56	53.614,56	54.114,56	54.614,56	55.114,56	55.114,56
2.3.6.	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan (jenis)	3	3	4	4	4	4	4	4
2.4.	Pengembangan sarana dan prasarana Pertanian Perkebunana dan Kehutanan								
2.4.1.	Pengembangan Jaringan irigasi (m)	317.380	322.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	342.8
2.4.2.	Pengembangan Jalan usaha tani (m)	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
2.4.3.	Penambahan jumlah Traktor (unit)	993	1.028	30	30	30	30	30	1.178
2.4.4.	Penambahan jumlah Pompa Air (unit)	1.655	1.685	25	25	25	25	25	1.810
2.4.5.	Penambahan jumlah Power threaser (unit)	331	341	20	20	20	20	20	441
2.4.6.	Penambahan jumlah Kendaraan Roda Tiga (unit)	15	25	10	10	10	10	10	75
2.5.	Kesejahteraan Petani								
2.5.1.	Jumlah kelompok tani dan kelompok masyarakat yang terbina	314	306	300	300	300	300	300	300
2.5.2.	Cakupan bina kelompok tani	32,80	36,14	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78
2.5.3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,52	104,54	104,56	104,58	104,60	104,62	104,64	104,64
3.	Kehutanan								
3.1.	Luas lahan kritis (ha)	7.770	7.270	6.770	6.270	5.770	5.270	4.770	4.770
3.2.	Luas Areal Hutan Rakyat (ha)	19.492	19.942	20.392	20.842	21.292	21.742	22.192	22.192

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun		Target Tahun					Target Kondisi Kinerja Akhir
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
3.3.	Luas rehabilitasi lahan dan hutan (Ha)	500	500	500	500	500	500	500	3.000
3.4.	Pembuatan bangunan pengendali erosi (unit)	20	20	20	20	20	20	20	120
3.5.	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (Ha)	200	200	200	200	200	200	200	1.200

BAB VII

PENUTUP

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD, maka indikator kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas untuk periode tahun 2013-2018 dirumuskan perencanaan strategis selama periode lima tahun (2008-2013) sebagai arah kebijakan dan pijakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dan memperhitungkan potensi (peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dan mengacu pada RKPD Kabupaten Banyumas.

Perencanaan strategik ini masih memerlukan pengembangan berdasarkan pengalaman dan aspirasi masyarakat ditingkat pelaksanaan di lapangan, sehingga arah pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan dapat terlaksana dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Purwokerto, Nopember 2013

KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. WIDARSO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620728 198901 1 001